

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan perlu menyadari bahwa keberhasilan atau prestasi yang dicapai bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan atau komunitas di sekitar perusahaan (Rahman, 2009). Selain itu, pada masa sekarang ini, terjadi perubahan paradigma dari masyarakat dan lingkungan terhadap perusahaan. Salah satu perubahan paradigma tersebut adalah adanya perubahan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Chapple dan Moon, 2005 dalam Saleh, et al., 2010). Perusahaan dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang lebih peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan, perusahaan melakukan pertanggungjawaban sosial atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Johnson dan Johnson, (2006) dalam (Hadi, 2011) mendefinisikan “*Corporate Social Responsibility(CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society*”.

Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola

bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu hanya pada kondisi keuangan (Untung, 2008). Namun, dengan berkembangnya konsep *Triple Bottom Line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997, perusahaan kini dihadapkan pada tiga konsep yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila orientasi perusahaan bergeser dari yang semula bertitik tolak hanya pada ukuran kinerja ekonomi, kini juga harus bertitik tolak pada keseimbangan lingkungan dan masyarakat dengan memperhatikan berbagai dampak sosial (Hadi, 2011).

Pelaksanaan CSR yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari perusahaan kepada masyarakat (sosial) dan lingkungan melanda dunia bisnis secara global, tidak terkecuali di Indonesia. Dengan diberlakukannya beberapa peraturan dan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dalam pasal 15 (b) yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Nomor KEP- 04/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Miliki Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang menyatakan adanya peran dari BUMN untuk melaksanakan PKBL,

praktik CSR di Indonesia telah diubah dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi suatu praktik tanggung jawab yang wajib (*mandatory*) dilaksanakan oleh perusahaan (Agus, 2011).

Dengan adanya ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan menuntut perusahaan untuk terlibat dalam pengelolaan masyarakat dan lingkungan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan suatu pertanggungjawaban sosial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau yang disebut dengan *stakeholder*. (Freeman, 1984 dalam Moir, 2001) menyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu rangkaian hubungan atas para *stakeholder*. Kemudian (Gray *et al.*, 1995) menyatakan bahwa antara perusahaan dengan *stakeholder* terdapat suatu hubungan dan oleh (Robert, 1992 dalam Gray *et al.*, 1995) dinyatakan bahwa CSR merupakan perantara yang relatif berhasil menjelaskan dan menegosiasikan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* tersebut.

Fenomena contoh kasus di Indonesia yang menerapkan konsep CSR pada perusahaan, menurut VIVAnews - Sebanyak 14 bank syariah mengucurkan bantuan corporate social responsibility (CSR) sebesar Rp 1,45 miliar. Dana tersebut akan disalurkan ke wilayah Jawa Timur. Menurut Dirut Bank Syariah Mandiri Yuslam Fauzi, CSR tersebut merupakan tindak lanjut dari Festival Ekonomi Syariah yang berkomitmen untuk melakukan kegiatan CSR secara bersama-sama. "Sebelumnya kita telah melakukan pembiayaan sindikasi, dan kegiatan di bidang syariah bersama-sama," kata Yuslam di Jakarta, Senin 2 Maret

2009. Kegiatan CSR akan dilakukan di daerah Surabaya dan Sidoarjo pada 6 dan 7 Maret 2009. Kota tersebut dipilih karena daerah tersebut memiliki sentra-sentra kerajinan dan industri kecil. Jumlah penerima dana CSR pada kegiatan tersebut sekitar 1.000 orang. Dalam pelaksanaan tersebut, akan melibatkan beberapa pihak yaitu bank syariah selaku sumber dana, Lembaga Amil Zakat di masing-masing bank syariah. iB CSR akan menyalurkan dananya kepada yang berhak dengan komposisi 50 persen untuk pengusaha ekonomi makro, 25 persen untuk sektor pendidikan, dan 25 persen untuk bantuan bencana alam dan kegiatan sosial lainnya (Umi et al, 2009).

Fenomena lain yaitu sektor perbankan Syariah di Indonesia sudah melewati perjalanan panjang sejak bank berbasis Islam ini pertama diluncurkan lebih dari dua dekade silam. Selama ini bank syariah dan keuangan syariah secara umum banyak melakukan pembiayaan pada sektor mikro yang belum banyak disentuh bank-bank konvensional.

Saat ini terdapat 11 bank umum syariah di Indonesia. Menurut Laporan Keuangan Publikasi Bank yang dikeluarkan Bank Indonesia, hingga 31 September 2013 nilai aset bank umum syariah mencapai Rp196,922 triliun. Aset terbesar dimiliki Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nilai sebesar Rp61,810 triliun. Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama mempunyai aset Rp50,754 triliun.

Di tempat ketiga, ada BRI Syariah dengan nilai aset sebesar Rp16,773 triliun. Jumlah pembiayaan yang dilakukan bank umum syariah hingga kuartal III-2013 sebesar Rp131,382 triliun. Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun 11 bank

umum syariah tersebut sebesar Rp141,143 triliun. Dana yang dihimpun bank syariah dipastikan akan bertambah besar mengingat saat ini Kementerian Agama mempercayakan pengelolaan dana haji kepada bank-bank syariah yang sudah ditunjuk.

Bank Indonesia mencatat, hingga 31 September 2013 jumlah kantor bank syariah sebesar 1.937 kantor. Jumlah ini mengalami peningkatan hampir 200 kantor dibanding akhir tahun 2012 yang sebanyak 1.745 kantor. Ada 23 bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS) dengan jumlah kantor sebanyak 558 unit. Jumlah kantor bank umum syariah diprediksi terus bertambah seiring ekspansi yang terus dilakukan. Aset bank syariah sekitar 5 persen dari total aset perbankan secara umum.

Saat ini secara persentase pertumbuhan bank syariah lebih besar dibanding perbankan nasional. Menurut data Bank Indonesia, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan bank syariah rata-rata 38–40 persen. Dengan pertumbuhan besar bukan tidak mungkin pangsa pasar bank syariah semakin besar. Salah satu kelebihan bank syariah dibanding bank konvensional adalah perhatian yang lebih besar kepada sektor mikro.

Komisaris Utama Bank Panin Syariah Aries Muftie menyebutkan, sejatinya perbankan syariah merupakan solusi finansial bagi penduduk Indonesia yang berpenghasilan menengah ke bawah yang belum terjangkau bank-bank konvensional. Perbankan syariah berpotensi untuk mencapai 54 juta UKM dan usaha mikro melalui lembaga-lembaga pembiayaan mikro.

Saat ini sekitar kurang dari 20 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses pinjaman ke bank. “Perbankan Syariah merupakan pembiayaan berbasis aset, sehingga dapat membantu usaha kecil & menengah (UKM) dan usaha mikro melalui prinsip berbagi risiko (risk sharing principles),” kata Ariessaat jumpaperspada Rabu lalu, 15 Januari.

Menurut Aries yang juga Ketua Asosiasi Baitul Maal wat-Tamwil Nasional, perbankan syariah memiliki nasabah dari berbagai segmen masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu, dia berharap Indonesia dapat memosisikan diri sebagai pusat perbankan syariah global. Perbankan syariah terbukti berhasil bisa menghadapi krisis lebih baik dari bank umum, karena banyak bermain di sektor mikro yang tidak mendapatkan imbas dibanding perusahaan besar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini menjadi penanggung jawab perbankan di Indonesia mendukung Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi syariah di dunia. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad. “Tahun ini OJK akan memulai penyusunan cetak biru pengembangan lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia yang akan diintegrasikan dengan sektor perbankan dan pasar modal syariah. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi syariah di dunia sebagai upaya menciptakan akses dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Muliaman dalam Financial Executive Gathering, Jumat 17 Januari.

Hal tersebut sejurus dengan pandangan pemerintah yang menyebutkan bahwa bank syariah memberikan perhatian besar pada sektor riil. Pemerintah mengklaim, ekonomi syariah dapat mengurangi kerentanan perekonomian akibat fenomena yang disebut *decoupling economy*. Sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah membuat tidak adanya jarak antara sektor keuangan dan sektor riil.

Perkembangan sektor keuangan merupakan cerminan kemajuan sektor riil. Ekonomi tidak mudah menjadi gelembung atau yang dikenal sebagai *bubble economy*. Sistem ekonomi syariah juga menghindarkan pembiayaan yang bersifat spekulatif atau eksploitasi pasar keuangan. Saat ini masih banyak usaha mikro yang belum tersentuh perbankan, termasuk perbankan syariah. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah untuk lebih menyentuh mereka dengan memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dimilikinya. (Islahuddin, 2014).

Alasan memilih Bank Umum Syariah sebagai sampel penelitian karena perkembangan lembaga keuangan syariah, salah satunya perbankan syariah dalam tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain market yang masih luas, operasional bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil (bebas bunga) yang merupakan landasan utama baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun produk lainnya. Karena produk bank syariah menghindari *riba*, *gharar* dan *maysir* menjadikan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim lebih merasa nyaman untuk menggunakan jasa perbankan syariah (Ascarya, 2008). Namun pada kenyataannya nasabah bank umum syariah tidak hanya muslim tetapi non muslim juga berminat

karena sistem bagi hasil yang dianut oleh bank syariah keuntungannya bisa melebihi sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Agus, 2011) yang berjudul “pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, terhadap *corporate social responsibility*” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah?
5. Apakah umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh umur perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah.
2. Untuk menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah.
3. Untuk menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah.
4. Untuk menganalisa pengaruh *leverage* terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah.
5. Untuk menganalisa pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan, mengetahui pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah dan untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab yang dijalankan oleh suatu perusahaan.
2. Bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi, untuk menambah studi

literatur mengenai pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya dibidang yang sama dimasa yang akan datang.

3. Bagi pihak perusahaan, untuk memberikan masukan bagi pengembangan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan, dan meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, serta sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi tiga bab yang secara garis besarnya bab demi bab disusun secara berurutan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat mengenai pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang dibahas dalam penelitian, perumusan masalah untuk mengungkapkan permasalahan obyek yang diteliti, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dilakukan, yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang selanjutnya digunakan dalam landasan

pembahasan dan pemecahan masalah, serta berisi penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

